

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

1.1 Kesimpulan

Ideologi 'Ibuisme Negara' masih ada namun, tidak menyurutkan keaktifan organisasi PKK. Meskipun demikian, ideologi 'Ibuisme Negara' saat ini nampak mulai pudar, karena penelitian ini mengungkapkan sulitnya untuk mencari Kader PKK sebab kontrol sosial seperti zaman Orde Baru tidak lagi sampai ke tingkat lokal pada kegiatan Posyandu, Dasawisma, PDKRT, Bank Sampah, serta Rumah Pangan Lestari. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Kader PKK memperoleh pengetahuan melalui kegiatan pemberdayaan PKK Desa Sumberjaya terkait program-program PKK yang didalamnya terkait dengan tata cara mengurus rumah tangga serta upaya peningkatan ekonomi rumah tangga.
2. Pengalaman-pengalaman Kader PKK Desa Sumberjaya dalam mengatasi hambatan serta memperoleh manfaat gerakan PKK menghasilkan perilaku komunikasi yang berbeda. Hambatan yang kerap diperoleh kader PKK Desa Sumberjaya adalah anggaran dana, pandemi Covid-19, diremehkan masyarakat, pergantian kader serta perbedaan pendapat. Dan manfaat yang diperoleh kader adalah pengetahuan terkait tata laksana rumah tangga, upaya peningkatan perekonomian keluarga, memperoleh pengalaman yang bermanfaat, serta memperoleh relasi.
3. Kader-kader PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi tidak merasa tenaga mereka dimanfaatkan karena mereka melakukan upaya pemberdayaan secara sukarela atas kemauan pribadi. Kesukarelaan kaum wanita berdasarkan observasi terhadap gerakan yang dilakukan oleh PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi terlihat pada tahapan perancangan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pemberdayaan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian Ibuisme Negara Era Reformasi Pada Gerakan PKK Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

5.2.1 PKK

1. Perlu adanya peningkatan program terkait tata laksana rumah tangga yang tidak hanya melibatkan kaum wanita namun juga melibatkan kaum pria sehingga, tidak diremehkan oleh masyarakat ketika melakukan upaya pemberdayaan dan mewujudkan kesetaraan.
2. Program-program di saat Covid-19 terkait pelatihan-pelatihan dilakukan secara online agar tidak menimbulkan kerumunan atau melaksanakan program-program kegiatan yang hanya dapat dihadiri oleh para kaum ibu yang tidak lebih dari 50% kapasitas aula Desa serta memperhatikan jarak pengaturan kursi untuk meminimalisir kerumunan.
3. Sosialisasi terhadap masyarakat terkait kegiatan PKK yang tidak hanya dilakukan melalui tatap muka namun juga melalui media sosial.
4. Melakukan tinjauan secara mendalam terhadap kader yang mengundurkan diri untuk mengetahui penyebab pengunduran diri.
5. Bekerjasama dengan LSM serta swasta untuk kerja sama jangka panjang untuk memperoleh anggaran untuk melaksanakan kegiatan PKK. Dan kegiatan PKK tidak hanya mengandalkan dana desa, namun juga bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan “*Market Day*” secara berkala.

5.2.2 Pemerintah Kabupaten Bekasi

1. Menyediakan aloksi dana untuk PKK di Kabupaten Bekasi.
2. Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan PKK perlu ditingkatkan secara berkala untuk menentukan peraturan terkait kegiatan PKK terutama di masa pandemic Covid-19.

Salsabila Khalilah Saputri, 2021

IBUISME NEGARA ERA REFORMASI PADA GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA SUMBER JAYA, KABUPATEN BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat terkait gerakan PKK secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak menimbulkan kesalahan persepsi terkait gerakan PKK.
4. Melakukan pendataan administrasi kader PKK secara berkala untuk mengetahui kader-kader yang masih tergabung dalam PKK serta kader yang telah mengundurkan diri.

5.2.3 Akademisi

1. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mewawancarai Ketua Progam PKK Kabupaten Bekasi sehingga dapat memperdalam maksud dan tujuan gerakan-gerakan pemberdayaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
2. Peneliti selanjutnya, perlu lebih banyak untuk mengeksplorasi mengenai pelaksanaan 'Ibuisme' Era Reformasi yang ada di organisasi-organisasi lain di wilayah Kabupaten Bekasi sehingga, hasil penelitian dapat menggambarkan 'Ibuisme' secara menyeluruh.
3. Perbanyak kajian-kajian yang membahas mengenai permasalahan gender terutama pada bidang Ilmu Komunikasi Gender.